



---

## ***Turning Local Fight Global: Strategi Advokasi Transnasional Environmental Justice Foundation dalam Upaya Memberantas Praktik “Saiko” di Ghana***

**Khanid Rachmadia Nova Putri, Reni Windiani, Fendy Eko Wahyudi**  
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### ***ABSTRACT***

*Fisheries is an important sector as a source of nutrition, income, and livelihood support for Ghanaian citizens. However, the Ghanaian fishing sector tends to be threatened by a number of problems which are mainly caused by illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing activities, in particular the practice commonly known as “Saiko” (transshipment). In response to this, a local Ghanaian non-governmental organization, Hen Mpoano, have attempted to advocate for the importance of eradicating Saiko practices in order to ensure the sustainability of the Ghanaian fisheries sector and formed a transnational network with the Environmental Justice Foundation (EJF) as an international non-governmental organization engaged in the humanitarian and environmental fields to advocate for the issue of Saiko practices in the global realm so that it can put pressure on the Ghanaian government to prioritize efforts to eradicate Saiko practices in its government agenda. This study aims to provide an explanation regarding the transnational advocacy strategies carried out by EJF using the conceptual framework of the Transnational Advocacy Network introduced by Keck and Sikkink. The findings of this study reveal that the transnational advocacy efforts carried out by EJF are carried out by implementing information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics.*

**Keywords:** *Environmental Justice Foundation; Saiko practices; transnational advocacy network; Ghanaian government; illegal fishing*

### **PENDAHULUAN**

Ghana merupakan salah satu negara di dunia yang bergantung pada sektor perikananannya. Dapat dikatakan demikian karena ikan dan hasil laut lainnya merupakan sumber utama protein hewani masyarakat Ghana dengan konsumsi per kapita mencapai 25 kg per tahunnya (Steiner-Asiedu, Dittoh, Newton, & Akotia, 2017). Ghana juga mengekspor hingga 3.500 ton hasil laut senilai 10 juta euro ke negara-negara Uni Eropa khususnya Perancis, Italia, Portugal, dan Spanyol tiap tahunnya (EJF, 2020b). Tidak hanya itu, sektor perikanan Ghana juga mampu memberikan lapangan kerja kepada sekitar 10% dari populasi dan memberikan kontribusi hingga 3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) (Fattibene, 2020). Meskipun telah diatur di bawah Undang-Undang Perikanan 2002 dan melibatkan sejumlah lembaga, rezim, serta perjanjian internasional dalam pengelolaannya (FAO, 2001), sektor perikanan Ghana cenderung terancam oleh sejumlah masalah yang utamanya disebabkan oleh praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (*IUU fishing*), utamanya praktik yang dikenal dengan sebutan “Saiko”.

Saiko merupakan praktik pemindahan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan yang bekerja di wilayah perairan nasional ke kapal lainnya agar hasil tangkapannya tidak perlu melalui proses pemeriksaan sehingga kapal penangkap ikan utamanya tidak perlu membayar biaya bea dan cukai (FAO, 2020). Praktik Saiko pada awalnya hanya merupakan kegiatan pembelian hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan dari kapal-kapal industri sehingga dapat membantu memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan komunitas pesisir pada musim tangkapan rendah. Namun, praktik Saiko berkembang menjadi industri praktik penangkapan ikan ilegal tersendiri yang dimanfaatkan untuk meraup keuntungan. Maraknya praktik Saiko utamanya disebabkan oleh upaya penegakan hukum yang tidak efektif dan penurunan stok ikan secara drastis di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Ghana (Afoakwa, Osei, & Effah, 2018; EJF, 2019b). Sebagai konsekuensinya, jumlah ikan artisanal yang didaratkan di Ghana mengalami penurunan dari 207.070 ton pada tahun 2002 menjadi 198.660 ton pada tahun 2014 (Alabi-Doku, Chen, Ampofo-Yeboah, & Asiedu, 2020). Praktik Saiko juga menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakseimbangan kekuatan dalam sektor perikanan Ghana. Hal tersebut disebabkan oleh praktik Saiko yang memungkinkan kapal pukat industri untuk ‘mencuri’ ikan dari para nelayan tradisional skala kecil secara terus menerus dan kemudian menjualnya kembali kepada mereka (EJF, 2019b).

Meskipun dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari penangkapan ikan ilegal, efek yang diberikan dari praktik Saiko digambarkan sebagai ‘pedang bermata dua’ karena kemampuannya untuk memberikan keuntungan pada satu sisi dan memberikan kerugian pada sisi lainnya. Pada satu sisi, praktik Saiko menyediakan lapangan kerja langsung kepada kurang lebih 15.400 warga negara Ghana di tiga lokasi utama praktiknya (Elmina, Apam, dan Axim) (EJF & Hen Mpoano, 2019b) dan hasil tangkapannya dapat membantu para pelaku yang terlibat untuk memenuhi kebutuhannya (Nunoo, Boateng, Ahulu, Agyekum, & Sumaila, 2009). Namun, pada sisi lainnya, praktik Saiko juga dapat dikatakan sebagai penyebab utama dari keruntuhan stok ikan di wilayah perairan Ghana dan mengancam ketahanan pangan warga negara Ghana (Lazar et al., 2018).

Kerugian yang disebabkan oleh maraknya praktik Saiko membuat organisasi non-pemerintah lokal Ghana yang bernama Hen Mpoano kemudian membentuk jaringan transnasional dengan organisasi non-pemerintah internasional yang bergerak pada bidang lingkungan dan hak asasi manusia, Environmental Justice Foundation (EJF), untuk mengadvokasikan isu praktik Saiko pada ranah internasional. Hal tersebut dilaksanakan setelah adanya kegagalan dari Hen Mpoano untuk mengadvokasikan isu tersebut pada ranah domestik sebab pemerintah Ghana yang menolak menjadikan upaya pemberantasan praktik Saiko sebagai salah satu prioritas dalam agenda pemerintahannya.

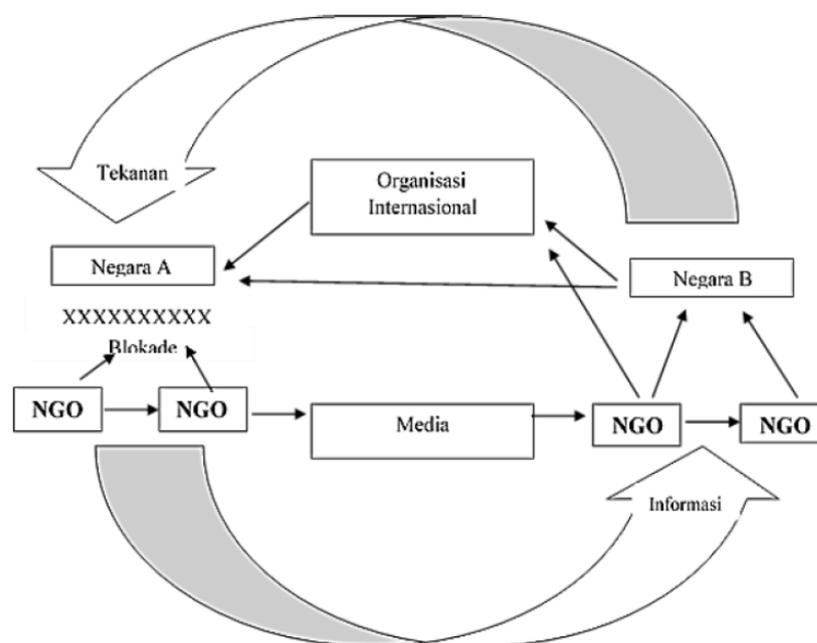
Strategi advokasi transnasional yang diterapkan oleh EJF dalam upaya memberantas praktik Saiko di Ghana menarik untuk diteliti. Penelitian ini berusaha untuk memberikan perkembangan dari sejumlah penelitian terdahulu. Dimulai dari penelitian karya Siebels (2020) yang membahas tentang bagaimana *IUU fishing* telah menjadi masalah yang berkepanjangan dan memebrikan dampak terhadap nilai stok ikan untuk negara-negara di wilayah Afrika Timur dan Barat. Berikutnya, terdapat penelitian karya Asiedu, Okpei, Nunoo, & Failler (2021) yang membahas tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam pengelolaan sektor perikanan guna memberantas praktik *IUU fishing* di Ghana. Terakhir, penelitian karya Petersson (2019) yang membahas tentang sistematika dan alasan terdapatnya strategi kemitraan dalam advokasi untuk mengembangkan dan mengimplementasi kebijakan terkait isu *IUU fishing* dalam konteks tata kelola global.

Sejumlah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sudah dapat memberikan ulasan dan pembahasan yang baik terkait *IUU fishing*. Namun, pembahasan tentang bagaimana strategi advokasi transnasional yang dilakukan oleh EJF dalam upaya

memberantas praktik “Saiko” di Ghana belum dapat ditemukan. Dengan demikian, penelitian ini akan berusaha untuk membantu memberikan penjelasan atas hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait strategi-strategi advokasi transnasional yang diterapkan oleh EJF dalam upaya memberantas praktik Saiko di Ghana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, makalah, artikel berita, situs resmi, buku, dan dokumen pendukung lainnya yang sekiranya berkaitan dengan pembahasan dan kebutuhan penelitian.

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana strategi advokasi transnasional yang dilakukan oleh EJF dalam upaya memberantas praktik Saiko di Ghana, maka diperlukan kerangka pemikiran konseptual. Penelitian ini menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* yang diusung oleh Margareth Keck dan Kathryn Sikkink. *Transnational Advocacy Network* dapat diartikan sebagai sekumpulan aktor dengan kesamaan nilai, norma, dan diskursus yang saling bertukar informasi dan sumber daya lainnya untuk bekerjasama pada isu-isu yang berdimensi internasional (M E Keck & Sikkink, 1998). Diantara sejumlah aktor yang terlibat dalam *transnational advocacy network*, organisasi non-pemerintah domestik dan internasional memiliki peran sentral dalam terbentuknya *transnational advocacy network* (Margaret E Keck & Sikkink, 1999). Dalam konsep ini, *transnational advocacy network* seringkali hadir pada isu yang terdapat *boomerang pattern*, *political entrepreneurs*, dan kontak internasional di dalamnya yang bertujuan untuk memberikan tekanan kepada aktor targetnya dengan melancarkan strategi-strategi politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas (M E Keck & Sikkink, 1998). Para aktor dalam *transnational advocacy network* pun dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari sejumlah strategi advokasi (Kinanthi, 2018).



**Gambar 1.** Boomerang Pattern dalam Transnational Advocacy Network

Merujuk pada Gambar 1, *boomerang pattern* cenderung terjadi karena adanya hambatan antara kelompok dan pemerintah domestik, yang seharusnya menjadi penjamin atas hak, sehingga terdapat limitasi (*blockage*) dalam upaya penyelesaian konflik (M E Keck & Sikkink, 1998). Oleh karena itu, kelompok domestik akan memanfaatkan kontak internasional untuk ‘memperkuat’ tuntutan mereka sehingga dapat membentuk ruang terbuka

untuk isu-isu baru dan menggemakan tuntutananya kembali ke ranah domestik (Margaret E Keck & Sikkink, 1999).

## PEMBAHASAN

Dalam upaya memberantas praktik Saiko di Ghana, *boomerang pattern* yang terbentuk diawali dengan advokasi yang dilakukan oleh Hen Mpoano yang berupaya untuk mengadvokasikan isu praktik Saiko pada ranah domestik. Namun, upaya yang dilakukan oleh Hen Mpoano tidak berhasil karena adanya limitasi dari pemerintah Ghana yang menolak menjadikan upaya pemberantasan Saiko sebagai salah satu prioritas dalam agenda pemerintahannya. Limitasi tersebut dibuktikan dengan adanya kontradiksi antara peraturan yang berlaku dan pernyataan oleh Menteri Perikanan dan Pengembangan Budidaya Ghana yang menyebutkan bahwa praktik Saiko adalah legal (EJF, 2019b; EJF & Hen Mpoano, 2019a) dan pada awal tahun 2020 lalu, praktik Saiko juga diberikan izin berlangsung seperti yang dinyatakan oleh Menteri perikanan dan Pengembangan Budidaya sebagai berikut.

*“there is a practice in this country called Saiko, it is not the intention of the NPP to spoil the ongoing business, there are rumours that the fisheries ministry has banned the practice but it is untrue ... we have not said you should stop Saiko, we are saying do it and do it well”* (Ghana News, 2020).

Dari ketidakberhasilan tersebut, Hen Mpoano kemudian membentuk jaringan transnasional dengan Environmental Justice Foundation (EJF) untuk mengadvokasikan isu praktik Saiko di Ghana dengan membentuk sebuah proyek tiga tahun bernama *Far Dwuma Nkodo* yang bertujuan untuk mewujudkan keberlanjutan pada sektor perikanan dan memberantas praktik Saiko di Ghana. Dengan demikian, EJF dapat dikatakan sebagai *political entrepreneurs* dalam upaya memberantas praktik Saiko di Ghana, yang berarti bahwa EJF merupakan pihak yang memiliki kemampuan serta pengalaman untuk memobilisasi sumber daya, keanggotaan, dan kesempatan politik untuk mendorong suatu isu menjadi sebuah agenda dalam *transnational advocacy network* (Carpenter, 2007; Tarrow, 1994).

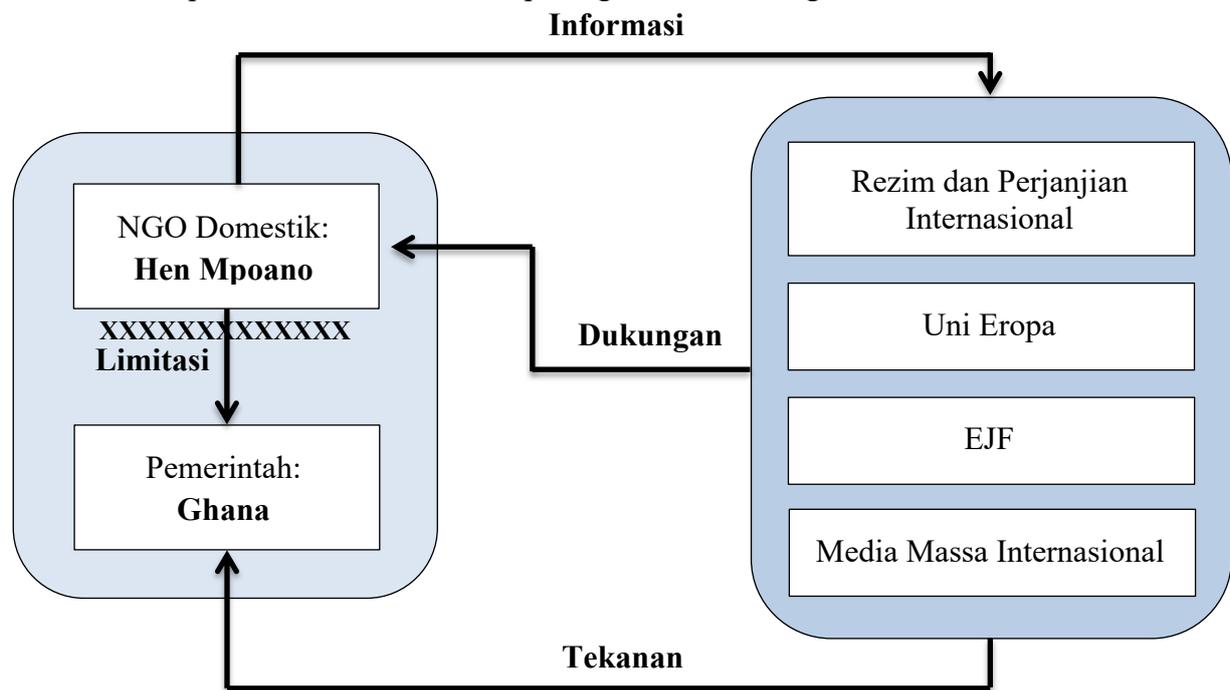
EJF melancarkan strategi-strategi pada ranah internasional yang kemudian bertujuan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Ghana sebagai aktor target sehingga dapat mengubah sikapnya dan merealisasikan upaya pemberantasan praktik Saiko sebagai salah satu prioritas dalam agenda pemerintahannya. Upaya advokasi transnasional yang dilakukan oleh EJF pun dibantu oleh kehadiran media massa internasional yang turut menaruh perhatiannya pada kasus penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Ghana, yaitu The Guardian, The Fish Site, dan The Maritime Executive. Pemberitaan yang dilakukan oleh para media massa internasional secara tidak langsung membantu pelaksanaan misi advokasi yang dilaksanakan EJF.

Pada tahun 2018, The Fish Site menjadi media massa internasional pertama yang mempublikasikan berita terkait praktik Saiko di Ghana memberitakan perilsan film dokumenter karya Hen Mpoano dan EJF yang mengungkap tingkat krisis dalam sektor perikanan Ghana (The Fish Site, 2018). Kurang lebih setahun kemudian yaitu pada Juni 2019. The Guardian mempublikasikan artikel berita yang memberitakan hasil temuan Hen Mpoano dan EJF terkait praktik Saiko yang membawa kerugian bagi sektor perikanan Ghana (The Guardian, 2019). Pemberitaan tentang praktik Saiko di Ghana juga dilakukan oleh media internasional The Marime Executive dalam publikasinya yang berjudul *“Report: Ghana’s Sardinella Fishery Collapsing”* pada awal tahun 2020 lalu (The Maritime Executive, 2020).

Upaya advokasi yang dilakukan oleh EJF juga menarik perhatian dari Uni Eropa sebagai pasar utama bagi Ghana untuk memasarkan hasil lautnya. Berkaitan dengan upaya memberantas praktik *IUU fishing* dan mencegah impor produk perikanan yang ditangkap secara ilegal ke pasar Uni Eropa, maka diberlakukan regulasi yang mewajibkan operator

untuk menunjukkan sertifikat tangkapan hasil laut ke dalam ranah Uni Eropa dan mengidentifikasi negara ketiga termasuk ke dalam kategori negara-negara yang bekerjasama dalam upaya memberantas praktik *IUU fishing* (*Council Regulation (EC) No. 1005, 2008*).

Pada November 2014, Ghana menerima kartu kuning peringatannya karena gagal memenuhi kewajibannya untuk memberantas praktik *IUU fishing* dan mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan (*European Commission, 2013*). Kartu kuning tersebut kemudian dicabut pada Oktober 2015 karena adanya serangkaian perbaikan dalam manajemen perikanan (European Commission, 2015). Namun, setelah maraknya praktik Saiko kembali diekspos, Uni Eropa menjatuhkan kartu kuning kedua kepada Ghana pada Juni 2021 (*EJF, 2021*). Dengan mengadopsi konsep *Transnational Advocacy Network* yang diusung oleh Keck dan Sikkink (1998), cara kerja *boomerang pattern* dalam upaya memberantas praktik Saiko di Ghana dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 2.** *Boomerang Pattern* dalam Upaya Memberantas Praktik Saiko di Ghana

Secara spesifik, strategi-strategi yang dilakukan oleh EJF dalam upaya memberantas praktik Saiko dapat dikategorikan menjadi politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas. Strategi pertama yaitu politik informasi merupakan bentuk pemanfaatan analisis data riset sebagai dasar kampanye advokasi untuk menghasilkan informasi dengan cepat dan kredibel untuk mengarahkan advokasi sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap publik (*Margaret E Keck & Sikkink, 1999; Kinanthi, 2018*). Dalam upaya memperoleh informasi, EJF menyelenggarakan forum konsultasi untuk mengumpulkan masukan dari komunitas nelayan guna meninjau kerangka hukum sektor perikanan Ghana (*EJF & Hen Mpoano, 2018b*). Kemudian, penyebaran informasi dilakukan dengan perilisian sejumlah laporan yang berkaitan dengan praktik Saiko di Ghana sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2020.

EJF juga meluncurkan program radio bulanan pada saluran ATL 100.5 FM di Cape Coast untuk meningkatkan kesadaran terkait dampak penangkapan ikan ilegal, pentingnya perikanan skala kecil Ghana untuk ketahanan pangan dan pendapatan nasional, serta tantangan yang dihadapi komunitas nelayan dalam konteks penurunan stok ikan dan peningkatan persaingan (*EJF & Hen Mpoano, 2018c*). Selain itu, NGO di negara maju juga

dapat memberikan pelatihan kepada NGO atau warga domestik di negara berkembang guna meningkatkan kapasitasnya dalam memperoleh dan mendokumentasikan informasi sehingga layak untuk dijadikan landasan dalam advokasi (Margaret E Keck & Sikkink, 1999). Dalam hal ini, EJF memberdayakan organisasi akar rumput dan para pemuda di Ghana dengan menawarkan pendanaan kepada para jurnalis yang melaporkan masalah pada sektor perikanan Ghana (EJF & Hen Mpoano, 2018c).

Pemanfaatan media oleh EJF dalam menyebarkan informasi terkait praktik Saiko di Ghana memperkuat posisi dan peran media yang penting sebagai mitra dalam politik informasi. Guna mendorong agenda pemberantasan praktik Saiko melalui perantara media massa, EJF melibatkan sejumlah editor dan jurnalis senior untuk membahas isu serta strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas praktik Saiko di Ghana (EJF & Hen Mpoano, 2021a). Untuk menarik perhatian media internasional, maka kelompok advokasi transnasional juga perlu memiliki hubungan dengan jurnalis yang bersimpati dengan kasus yang diadvokasikan (Margaret E Keck & Sikkink, 1999). Berkaitan dengan hal tersebut, EJF sendiri memiliki hubungan dengan jurnalis The Guardian, Kate Hondal, yang berafiliasi dengan organisasi Humanity United yang merupakan mitra dari EJF dalam advokasi isu perbudakan modern di Thailand pada tahun 2014 lalu.

Strategi kedua yaitu politik simbolik merupakan upaya pembingkaihan isu dengan bahasa yang lebih umum dan populer sehingga dapat dipahami oleh masyarakat umum dan berimplikasi pada menarik lebih banyak pihak untuk mendukung posisi dan tuntutan advokasi (M E Keck & Sikkink, 1998). Oleh karena itu, advokasi yang dilakukan harus mampu memiliki kemampuan untuk meyakinkan dengan menggunakan istilah yang menunjukkan urgensi dari advokasi yang dilakukan (Benford & Snow, 2000). Dalam hal ini, EJF menampilkan pernyataan dari Ekuwa Kokuwa, salah satu penjual ikan di Ankaful, pada laman depan situs resminya sebagai berikut.

*“Saiko has destroyed our ocean. It is worrying because the trawlers catch all the fishes meant to be caught by our husbands and use it for Saiko. Government must support coastal communities by stopping Saiko because we are really suffering”* (EJF & Hen Mpoano, 2019a).

Pembingkaihan isu dalam politik simbolik juga dapat dilakukan dengan menyederhanakan isu melalui jargon atau slogan (Margaret E Keck & Sikkink, 1999). Dalam mengadvokasikan isu praktik Saiko, EJF menyebarkan pemahaman dan meningkatkan kesadaran terkait isu praktik Saiko melalui kampanye dengan slogan #StopSaikoNow pada media sosial Facebook dan Twitter. Penggunaan slogan #StopSaikoNow pun ramai dilakukan bersama dengan sejumlah organisasi lainnya seperti Hen Mpoano, GNCFC, Friends of the Nation, dan Oxfam (EJF & Hen Mpoano, 2021b). Slogan tersebut memberikan kesan penegasan yang menekankan pada pentingnya memberantas praktik Saiko yang mengancam kesejahteraan nelayan maupun sektor perikanan Ghana.

Strategi ketiga yaitu politik pengaruh yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi aktor yang lebih kuat seperti pemerintah negara lain, organisasi internasional, maupun perusahaan multinasional untuk memberikan tekanan kepada aktor targetnya untuk pada akhirnya mengubah kebijakan (M E Keck & Sikkink, 1998). Implikasi yang diberikan dari politik pengaruh pun dibagi menjadi dua: pengaruh dari segi material dan dari segi moral. Dari segi material, aktor dalam *transnational advocacy network* dapat melakukan lobi negara atau institusi yang sedang melakukan kegiatan ekonomi dengan aktor target. Kemudian dari segi moral, politik pengaruh dipandang sebagai kemampuan aktor *transnational advocacy network* untuk mempermalukan aktor target sehingga isu advokasi dapat menjadi komunitas internasional dan dengan menjadi sorotan, aktor target diharapkan dapat mengubah perilaku dan/atau kebijakannya (Margaret E Keck & Sikkink, 1999).

Dari segi material, EJF menuntut Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa untuk meneliti secara rinci semua impor hasil laut Uni Eropa untuk membantu Ghana memberantas praktik Saiko dan meningkatkan transparansi dalam manajemen sektor perikananannya (EJF & Hen Mpoano, 2020). Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan dirilisnya laporan berjudul “*Europe – A Market for Illegal Seafood from West Africa: The Case of Ghana’s Industrial Trawl Sector*” yang kemudian dipresentasikan di hadapan Market Advisory Council (MAC) pada September 2020 (EJF & Hen Mpoano, 2021b). Dengan melibatkan Uni Eropa sebagai aktor yang dianggap lebih kuat, maka efektivitas politik pengaruh yang dilakukan oleh EJF tentunya akan meningkat dengan adanya penjatuhan ‘hukuman’ bersifat material kepada pemerintah Ghana.

Selain itu, dalam pelaksanaan politik pengaruh EJF juga mengadvokasikan isu praktik Saiko melalui situs web dan membuat, mengunggah, serta menayangkan film dokumenter pada kanal YouTube resmi dan pada forum-forum regional. Penyebaran isu kepada audiens yang lebih luas digunakan sebagai bentuk ironi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa malu aktor target yang dalam hal ini mengacu pada pemerintah Ghana (Kinanthi, 2018).

Selanjutnya, dari segi moral, EJF bersama dengan delapan NGO lainnya menuntut Presiden Ghana untuk membantu memberantas praktik Saiko yang mendorong stok ikan Ghana menuju titik kehancuran dan membahayakan sumber mata pencaharian serta ketahanan pangan masyarakat Ghana melalui perilisian sebuah surat terbuka (EJF, 2020a). Urgensi untuk memberantas praktik Saiko di Ghana pun disampaikan sebagai berikut.

*“If this menace is not urgently addressed and measures instituted to permanently eradicate it, the source of income for over 2.7 million Ghanaians will be lost ... The lost of jobs amongst the youth will contribute to the rise of social vices and crime within the fishing communities and our wider wider societ ... We note, with urgency, that any hope of saving Ghana’s fisheries from collapse is contingent on ending the saiko menace without delay”* (GNCFC et al., 2020).

Strategi keempat yaitu politik akuntabilitas merupakan upaya untuk memastikan bahwa aktor target menjalankan dan mempertahankan prinsip-prinsip yang telah disepakati (M E Keck & Sikkink, 1998). Oleh karena itu, politik akuntabilitas merupakan puncak tertinggi dalam upaya advokasi oleh aktor *transnational advocacy network*. Dalam hal ini, politik akuntabilitas terlihat pada saat aktor target bersedia untuk mengubah perilaku serta kebijakannya sesuai dengan standar yang menjadi dasar tuntutan dari EJF sebagai salah satu aktor dalam *transnational advocacy network* terkait isu praktik Saiko di Ghana.

EJF menjalankan politik akuntabilitas melalui perilisian “*The Ten Principles for Global Transparency*” yang berfokus pada menghasilkan komitmen dan mengambil tindakan untuk menjaga keberlanjutan laut pada tahun 2018 lalu (EJF, 2019a). Tujuan dari dirilisnya 10 prinsip transparansi global disampaikan oleh Steve Trent selaku Direktur Eksekutif EJF melalui pernyataan sebagai berikut.

*“The wide spread of these ten basic principles would transform the global seafood production sector and allow both governments and businesses to secure legal, sustainable, and ethical seafood, eradicating most illegal fishing and the most serious human rights abuses”* (EJF, 2019a).

Guna mewujudkan keberhasilan akan advokasi yang dilakukan terkait isu praktik Saiko di Ghana, EJF pun berharap pemerintah Ghana sebagai aktor target dapat turut mengimplementasi prinsip-prinsip yang menjadi rekomendasi EJF. Di samping itu, ketidakmampuan Ghana untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal dapat memberikan ancaman kehilangan tujuan ekspor utamanya, yaitu negara-negara Uni Eropa. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya jaringan yang dimiliki oleh EJF dengan Uni Eropa membuat EJF dapat mempengaruhi kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa, salah satunya

adalah untuk memboikot impor komoditas hasil laut dari Ghana dengan memberikan kartu kuning atau bahkan kartu merah melalui skema *the carding process*.

Selain memanfaatkan kekuatan informasi dan pengaruh dalam advokasi transnasionalnya, EJF juga memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membantu memberantas praktik Saiko di Ghana. Hal tersebut dilakukan melalui pengamatan yang dilakukan oleh EJF atas aktivitas kapal penangkap ikan di wilayah perairan Ghana dan kapal berbendera Ghana. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bernama ExactEarth, yaitu sistem pelacakan berbasis satelit yang dilengkapi dengan Sistem Identifikasi Otomatis. Sebagai hasil dari pengamatan tersebut, sejumlah pemberitahuan telah dikirim kepada otoritas perikanan di Ghana dan negara tetangganya, Pantai Gading, untuk menyelidikan dan tindak lanjut (EJF & Hen Mpoano, 2018b).

Tidak hanya itu, EJF juga mengembangkan aplikasi seluler bernama “DASE” yang bertujuan untuk menyediakan sarana sederhana dan ramah pengguna bagi para nelayan untuk merekam informasi terkait penangkapan ikan ilegal dan perambahan oleh kapal industri yang mereka saksikan di wilayah perairan Ghana (EJF & Hen Mpoano, 2018b). Data yang dilaporkan diberikan label geografis dan dikirimkan ke basis data pusat sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat tumpang tindih dan konflik antara kapal penangkap ikan skala kecil dengan kapal industri, memberikan bukti tuntutan atas kasus individu penangkapan ikan ilegal, serta membantu nelayan mendapatkan ganti rugi apabila diperlukan (EJF & Hen Mpoano, 2018a).

Langkah-langkah kampanye advokasi yang dilakukan oleh EJF dalam upaya memberikan tekanan memaksa pemerintah Ghana untuk mengubah perilaku serta kebijakannya terkait sektor perikanan. Pemerintah Ghana telah menunjukkan kesediaannya untuk berkomitmen pada upaya memberantas praktik Saiko pada saat Menteri Perikanan dan Pengembangan Budidaya (MoFAD) Ghana menyebutkan bahwa pemberantasan tersebut merupakan prioritas utama pemerintah untuk memastikan pemulihan stok ikan dan keberlanjutan sektor perikanan Ghana (EJF, 2019b; EJF & Hen Mpoano, 2019a). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah Ghana mengeluarkan kebijakan penerapan musim tertutup<sup>36</sup> tertanggal 15 Mei sampai dengan 15 Juni 2019 untuk semua armada untuk melindungi induk ikan yang sedang berkembang biak (MoFAD, 2019).

Penerapan musim tertutup oleh pemerintah Ghana membantu memberikan penurunan yang signifikan pada aktivitas Saiko di Elmina, tempat pendaratan utama ikan hasil praktik Saiko di wilayah pusat Ghana. Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah Ghana jelas berfungsi secara efektif dalam menghentikan praktik Saiko. Namun, penurunan tersebut tidak berlangsung untuk waktu yang lama. Melalui pemantauan yang dilakukan oleh EJF menunjukkan bahwa aktifitas Saiko kembali meningkat di Elmina hanya beberapa bulan kemudian (EJF, 2019c).

Kampanye advokasi yang dilakukan oleh EJF pun turut mendapat dukungan dari pihak Uni Eropa. Dalam sebuah wawancara dengan media pada Oktober 2020, Robert Schiliro selaku Duta Besar Uni Eropa kepada Ghana menyampaikan permintaannya kepada warga Ghana untuk bergabung dalam perang melawan praktik Saiko untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan negara (EJF & Hen Mpoano, 2021b). Tidak hanya itu, dalam upaya memberantas praktik Saiko, Robert Schiliro menjanjikan komitmen Uni Eropa untuk turut membantu dalam mengakhiri praktik penangkapan ikan ilegal dalam segala bentuk (Ghana Business News, 2020).

Meskipun telah diserukan tuntutan dari masyarakat lokal maupun global dan diberikan bantuan Uni Eropa dalam upaya memberantas praktik Saiko, pemerintah Ghana tetap dianggap gagal dalam menangani isu tersebut. Oleh karena itu, pada akhirnya Uni Eropa memberikan kartu kuning peringatan kedua pada Juni 2021 lalu. Keputusan pemberian kartu kuning didasarkan pada ketidakmampuan Ghana untuk memenuhi kewajibannya di

bawah hukum internasional sebagai negara bendera, pelabuhan, pesisir, atau pasar (European Commission, 2021).

Menanggapi pemberian kartu kuning peringatan kedua dari Uni Eropa, Menteri Perikanan dan Pengembangan Budidaya Ghana saat ini, Mavis Hawa Koomson, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi kembali undang-undang dan kebijakan yang mengatur sektor perikanan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan Ghana memenuhi tuntutan yang ada dalam pengelolaan perikanan dan praktik terbaik internasional (MyJoyOnline, 2021). Kemudian Pemerintah Ghana juga mengambil langkah-langkah nyata melalui perolehan empat kapal patroli yang akan dikerahkan pada empat wilayah pesisir untuk mendukung inspeksi laut secara rutin dan melakukan penelitian ilmiah terhadap sektor perikanan (SeafoodSource, 2021). Peninjauan undang-undang perikanan dan akusisi kapal patroli merupakan beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah Ghana untuk memastikan bahwa ekosistem perikanan Ghana tetap hidup dan produktif sehingga dapat mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan yang terbebas dari bahaya praktik Saiko.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa strategi advokasi transnasional yang dilakukan oleh Environmental Justice Foundation (EJF) dapat dikatakan berhasil dengan adanya bukti terjadinya *boomerang pattern* dengan melangsungkan strategi politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas yang membawa implikasi perubahan perilaku aktor target, yaitu pemerintah Ghana, untuk mengubah kebijakannya guna mengupayakan pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal Saiko di Ghana. Dalam upaya memberantas praktik Saiko di Ghana, EJF turut melakukan sejumlah strategi lain dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal tersebut dilakukan melalui pengamatan terhadap aktivitas kapal penangkap ikan dan kapal berbendera Ghana dengan menggunakan sebuah perangkat lunak yang dilengkapi dengan Sistem Identifikasi Otomatis bernama ExactEarth. Selain itu, EJF juga mengembangkan aplikasi seluler bernama “DASE” yang memungkinkan para nelayan untuk mengambil gambar atau rekaman dan memberikan informasi lokasi yang tepat apabila terdapat praktik penangkapan ikan ilegal yang mereka saksikan di laut.

Keberhasilan EJF dalam upaya mengadvokasikan isu praktik Saiko di Ghana terbukti berhasil ketika pemerintah Ghana telah menentukan sikap untuk berkomitmen dalam upaya memberantas praktik penangkapan ikan ilegal Saiko dan mengambil langkah untuk meninjau kembali peraturan serta regulasi yang diterapkan dalam sektor perikanan Ghana. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Ghana atas adanya kesadaran akan pentingnya mewujudkan sektor perikanan yang berkelanjutan dan terbebas dari bahaya praktik penangkapan ikan ilegal guna membantu menjamin kesejahteraan nelayan skala kecil serta ketahanan pangan warga negara Ghana.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam hal ini, penulis ingin memberikan apresiasi dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, M.S. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Fendy Eko Wahyudi, S.IP, M.Hub.Int. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Satwika Paramasatya, S.IP, MA selaku Dosen Penguji yang juga telah membantu memberikan saran untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi penelitian. Penulis berharap Ibu Reni, Bapak Fendy, dan Bapak Satya dapat diberikan kesehatan agar segala pelaksanaan tanggungjawabnya dapat dimudahkan serta diberikan kelancaran.

## REFERENSI

- Afoakwa, R., Osei, M. B. D., & Effah, E. (2018). A guide on illegal fishing activities in Ghana. *USAID/Ghana Sustainable Fisheries Management Project. Narragansett, RI: Coastal Resources Center, Graduate School of Oceanography, University of Rhode Island. Prepared by the University of Cape Coast, Ghana. GH2014\_SCI048\_UCC, 64.*
- Alabi–Doku, B. N., Chen, S., Ampofo-Yeboah, A., & Asiedu, B. (2020). Ghana’s Fisheries Policies; Evolution and Performance. *Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research, 11–22.*
- Asiedu, B., Okpei, P., Nunoo, F. K. E., & Failler, P. (2021). A fishery in distress: An analysis of the small pelagic fishery of Ghana. *Marine Policy, 129.*
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. *Annual Review of Sociology, 26(1), 611–639.*
- Carpenter, R. C. (2007). Setting the advocacy agenda: Theorizing issue emergence and nonemergence in transnational advocacy networks. *International Studies Quarterly, 51(1), 99–120.*
- Council Regulation (EC) No. 1005.* (2008). Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1005>
- EJF. (2019a). EJF’s Ten Principles for Global Transparency in the Fishing Industry Launched. Retrieved March 1, 2022, from <https://ejfoundation.org/news-media/ejfs-ten-principles-for-global-transparency-in-the-fishing-industry-launched>
- EJF. (2019b). Ghana’s Fisheries Minister Calls for End of Damaging “Saiko” Fishing. Retrieved March 2, 2022, from <https://ejfoundation.org/news-media/ghanas-fisheries-minister-calls-for-end-of-damaging-saiko-fishing>
- EJF. (2019c). The Minister is Right: For the Sake of Ghana’s People and its Fisheries, Saiko Must Stop. Retrieved March 2, 2022, from <https://ejfoundation.org/news-media/the-minister-is-right-for-the-sake-of-ghanas-people-and-its-fisheries-saiko-must-stop>
- EJF. (2020a). Canoe Fishers and NGOs Urge Ghana’s President to Crackdown on Illegal “Saiko” Fishing. Retrieved February 25, 2022, from <https://ejfoundation.org/news-media/canoe-fishers-and-ngos-urge-ghanas-president-to-crackdown-on-illegal-saiko-fishing>
- EJF. (2020b). WARNING TO EU OVER IMPORTS FROM VESSELS FISHING ILLEGALLY IN GHANA. Retrieved June 16, 2021, from <https://ejfoundation.org/news-media/warning-to-eu-over-imports-from-vessels-fishing-illegally-in-ghana>
- EJF. (2021). GHANA GIVEN SECOND “YELLOW CARD” WARNING FROM EU OVER ILLEGAL FISHING.
- EJF, & Hen Mpoano. (2018a). *Project update: July - December 2018.* Retrieved from [https://ejfoundation.org/resources/downloads/Ghana-newsletter\\_2019-July-December-2018-v9-print.pdf](https://ejfoundation.org/resources/downloads/Ghana-newsletter_2019-July-December-2018-v9-print.pdf)
- EJF, & Hen Mpoano. (2018b). *Project update - January to June 2018.* Retrieved from [https://ejfoundation.org/resources/downloads/FDN\\_project\\_update\\_Jan-Jun\\_2018.pdf](https://ejfoundation.org/resources/downloads/FDN_project_update_Jan-Jun_2018.pdf)
- EJF, & Hen Mpoano. (2018c). *THE PROBLEM WITH “SAIKO” AN ECOLOGICAL AND HUMAN CATASTROPHE.* Retrieved from <https://ejfoundation.org/reports/the-problem-with-saiko>
- EJF, & Hen Mpoano. (2019a). *Securing Equitable and Sustainable Fisheries: The Case for Greater Transparency in the Management and Governance of Ghana’s Fisheries Sector.* Retrieved from <https://ejfoundation.org/reports/securing-equitable-and-sustainable-fisheries-the-case-for-greater-transparency-in-the-management-and-governance-of-ghanas-fisheries-sector>
- EJF, & Hen Mpoano. (2019b). *STOLEN AT SEA How illegal ‘saiko’ fishing is fuelling the*

- collapse of Ghana's fisheries.* Retrieved from [https://ejfoundation.org/resources/downloads/Stolen-at-sea\\_06\\_2019.pdf](https://ejfoundation.org/resources/downloads/Stolen-at-sea_06_2019.pdf)
- EJF, & Hen Mpoano. (2020). *Europe - A Market for Illegal Seafood from West Africa: The Case of Ghana's Industrial Trawl Sector.* Retrieved from [https://ejfoundation.org/resources/downloads/EJF\\_Europe-A-Market-for-Illegal-Seafood-from-West-Africa\\_2020\\_final.pdf](https://ejfoundation.org/resources/downloads/EJF_Europe-A-Market-for-Illegal-Seafood-from-West-Africa_2020_final.pdf)
- EJF, & Hen Mpoano. (2021a). *Project update: January to June 2020.* Retrieved from [https://ejfoundation.org/resources/downloads/FDN-Newsletter\\_Jan-June-2020.pdf](https://ejfoundation.org/resources/downloads/FDN-Newsletter_Jan-June-2020.pdf)
- EJF, & Hen Mpoano. (2021b). *Project update: July to December 2020.* Retrieved from <https://ejfoundation.org/resources/downloads/FDN-newsletter-July-December-2020.pdf>
- European Commission. (2013). *COMMISSION DECISION of 26 November 2013* (pp. 1–24). pp. 1–24. Retrieved from [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1127\(02\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1127(02)&from=EN)
- European Commission. (2015). *Notice of Information of the Termination of the Demarches with Third Countries Notified on 26 November 2014 of the Possibility of being Identified as Non-Cooperating Third Countries Pursuant to Council Regulation (EC) No 1005/2008 Establishing a Community.* Retrieved from [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1002\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1002(01)&from=EN)
- European Commission. (2021). *Fighting against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Commission notifies the Republic of Ghana with a Yellow Card.* Retrieved February 26, 2022, from [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_21\\_2745](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2745)
- FAO. (2001). *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.* Rome.
- FAO. (2020). *Sustainability in action. State of World Fisheries and Aquaculture. Rome, 200.*
- Fattibene, D. (2020). *Empty Oceans: EU Policy and Illegal Fishing in Ghana.* Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/344883420\\_Empty\\_Oceans\\_EU\\_Policy\\_and\\_Illegal\\_Fishing\\_in\\_Ghana](https://www.researchgate.net/publication/344883420_Empty_Oceans_EU_Policy_and_Illegal_Fishing_in_Ghana)
- Ghana Business News. (2020). *EU calls on Ghana to end saiko fishing.* Retrieved March 3, 2022, from <https://www.ghanabusinessnews.com/2020/10/15/eu-calls-on-ghana-to-end-saiko-fishing/>
- Ghana News. (2020). *Fisheries minister criticised for endorsing “Saiko” business.* Retrieved February 15, 2022, from <https://www.myjoyonline.com/fisheries-minister-criticised-for-endorsing-saiko-business/>
- GNCFC, Livestock and Fisheries Chamber, CERATH Development Organization, EJF, Hen Mpoano, CARE, ... Centre for Maritime Law and Security (CEMLAWS) Africa. (2020). *Call for Urgent Action to End Saiko to Save the Livelihoods of Over 2.7 Million Ghanaians.* Retrieved from <https://ejfoundation.org/resources/downloads/Open-Letter-to-Ghanas-President.pdf>
- Keck, M E, & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics.* Cornell University Press.
- Keck, Margaret E, & Sikkink, K. (1999). *Transnational advocacy networks in international and regional politics. International Social Science Journal, 51(159).*
- Kinanthi, D. K. (2018). *1965 International People's Tribunal: Aksi Rakyat Pemutus Lingkaran Kebisuan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lazar, N., Yankson, K., Blay, J., Ofori-Danson, P., Markwei, P., Agbogah, K., ... Bilisini, W. B. (2018). *Status of the small pelagic stocks in Ghana and recommendations to achieve sustainable fishing 2017. Scientific and Technical Working Group. USAID/Ghana Sustainable Fisheries Management Project (SFMP). Coastal Resources Center, Graduate School of Oceanography, University of Rhode Island. GH2014\_SCI042\_CRC.*

- MoFAD. (2019). *The People's Fish - A Crisis for Ghana's Canoe Sector*.
- MyJoyOnline. (2021). New Fisheries Act is being drafted to regulate sector - Hawa Koomson. Retrieved March 3, 2022, from <https://www.myjoyonline.com/new-fisheries-act-is-being-drafted-to-regulate-sector-hawa-koomson/>
- Nunoo, F. K. E., Boateng, J. O., Ahulu, A. M., Agyekum, K. A., & Sumaila, U. R. (2009). When trash fish is treasure: the case of Ghana in West Africa. *Fisheries Research*, 96(2–3), 167–172.
- Petersson, M. T. (2019). Transnational partnerships' strategies in global fisheries governance. *Interest Groups & Advocacy*, 8(3), 460–479.
- SeafoodSource. (2021). Ghana updating its laws, adding patrol boats to fight IUU fishing. Retrieved March 3, 2022, from <https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/ghana-reviewing-its-fisheries-act-to-protect-its-fisheries#:~:text=Ghana has begun drafting a,siege from illegal fishing operations.>
- Siebels, D. (2020). A Victimless Crime. In *Maritime Security in East and West Africa* (pp. 57–72). Springer.
- Steiner-Asiedu, M., Dittoh, S., Newton, S. K., & Akotia, C. (2017). *Addressing Sustainable Development Goal 2: THE GHANA ZERO HUNGER STRATEGIC REVIEW*. Retrieved from [https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000071730/download/?\\_ga=2.47054116.2038938788.1535558371-1957203229.1486643929](https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000071730/download/?_ga=2.47054116.2038938788.1535558371-1957203229.1486643929)
- Tarrow, S. (1994). *Power in movement: Collective action, social movements and politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- The Fish Site. (2018). Film to Highlight Ghanaian Fish Transshipments. Retrieved February 24, 2022, from <https://thefishsite.com/articles/film-to-highlight-ghanaian-fish-transshipments>
- The Guardian. (2019). Illegal Fishing by Foreign Trawlers Costs Ghana \$50m a Year, Researchers Say. Retrieved February 24, 2022, from <https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/17/illegal-fishing-by-foreign-trawlers-costs-ghana-50-million-dollars-a-year-researchers-say>
- The Maritime Executive. (2020). Report: Ghana's Sardinella Fishery Collapsing. Retrieved February 24, 2022, from <https://www.maritime-executive.com/article/report-ghana-s-sardinella-fishery-collapsing>